

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Sistem Akuntansi**

Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan dalam pengelolaan data perusahaan (Mulyadi 2016:3).

##### **2. Pengertian Sistem dan Prosedur**

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Baridwan,2010:4). Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2016:4).

##### **3. Pengertian Aset tetap**

Menurut PSAP 07 aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

##### **4. Definisi Sistem Akuntansi Aset Tetap**

Sistem akuntansi aset tetap merupakan perancangan sistem untuk menangani transaksi yang bersangkutan dengan mutasi aset tetap. Sistem ini terdiri dari jaringan prosedur berikut salah satunya prosedur pengadaan aset tetap. Sistem tersebut yang menghasilkan berbagai dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam catatan akuntansi dilukiskan hubungannya dengan sistem akuntansi

pokok (Mulyadi 2016:14)

5. Dokumen Yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap

Dokumen yang digunakan dalam sistem penghapusan aset tetap adalah:

a. Surat permintaan Transfer Aset Tetap

Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap.

b. Surat Permintaan Penghentian Pemakaian Aset Tetap

Dokumen ini digunakan sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap.

c. Bukti Memorial

Dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aset tetap dan pengeluaran modal (Mulyadi:504)

6. Catatan Akuntansi yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap  
Catatan akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi yang

mengubah harga pokok aset tetap adalah:

a. Kartu Aset Tetap

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang terkait dengan aset tetap tertentu (Mulyadi, 2016:512).

b. Jurnal Umum

Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap (Mulyadi, 2016:512).

c. Register Bukti Kas Keluar

Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas (Mulyadi, 2016:512).

7. Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap

a. Fungsi Pemakai

Dalam sistem akuntansi aset tetap, fungsi pemakai bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Unit organisasi pemakai aset tetap berfungsi mengelola pemakaian aset tetap. (Mulyadi, 2016:513)

b. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Di samping itu, fungsi ini bertanggung jawab melakukan studi kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi lain dalam perusahaan (Mulyadi, 2016:513).

c. Direktur yang Terkait

Pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi investasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya (Mulyadi, 2016:514).

d. Direktur Utama

Pejabat ini yang memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Otorisasi ini dicantumkan dalam formulir surat permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan

otorisasi reparasi (Mulyadi, 2016:514).

e. Fungsi Pembelian

Fungsi ini bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap (Mulyadi, 2016:514).

f. Fungsi Penerimaan

Fungsi ini bertanggung jawab memilih melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Hasil pemeriksaan terhadap aset tetap tersebut dicantumkan dalam laporan penerimaan barang (Mulyadi, 2016:514).

g. Fungsi Aset Tetap

Fungsi ini bertanggungjawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. Fungsi ini memiliki wewenang dalam penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aset tetap (Mulyadi, 2016:514).

h. Fungsi Akuntansi

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber (bukti kas keluar dan bukti memorial) untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Di samping itu, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan dengan aset tetap (register bukti kas keluar dan jurnal umum) (Mulyadi, 2016:514).

8. Jaringan Subsistem Yang Membentuk Sistem Akuntansi Aset Tetap

Menurut Mulyadi (2016), jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap ada 7 yaitu: sistem pembelian aset tetap, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, sistem pengeluaran modal, sistem penghentian pemakaian aset tetap, sistem transfer aset tetap, sistem revaluasi aset tetap, sistem akuntansi

penyusutan aset tetap. Subsistem pada pembahasan teori penelitian yaitu sistem penghentian pemakaian aset tetap.

a Sistem Penghentian Pemakaian Aset Tetap

Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan penghentian pemakaian aset tetap adalah bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat permintaan penghentian dan transfer aset tetap.

9. Unsur Pengendalian Internal dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap

Unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi aset tetap sebagai berikut:

a Organisasi

Organisasi dalam unsur pengendalian internal sistem akuntansi aset tetap sebagai berikut:

1. Fungsi pemakai harus terpisah dan fungsi akuntansi aset tetap.
2. Transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen.

b Sistem Otorisasi

Sistem otorisasi dalam unsur pengendalian internal sistem akuntansi aset tetap sebagai berikut:

1. Anggaran investasi diotorisasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan otorisasi reparasi, surat permintaan penghentian

pemakaian aset tetap, dan surat permintaan transfer aset tetap diotorisasi oleh Direktur yang bersangkutan dan Direktur Utama.

3. Surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada Departemen yang bersangkutan.
  4. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
  5. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan.
  6. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi.
  7. Bukti memorial diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi.
- c. Prosedur Pencatatan

Prosedur pencatatan dalam unsur pengendalian internal sistem akuntansi aset tetap adalah perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar, atau bukti memorial, atau surat permintaan transfer aset tetap yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

d. Praktik yang Sehat

Praktik yang sehat dalam unsur pengendalian internal sistem akuntansi aset tetap sebagai berikut:

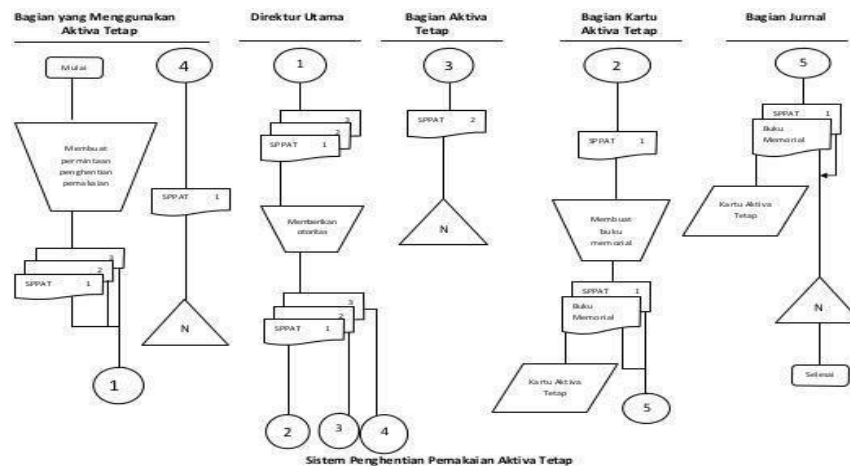
1. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap.
2. Penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap.
3. Penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian.
4. Kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal (*capital expenditure*) dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*)

(Mulyadi:517).

## 10. Bagan Alir Sistem Akuntansi Aset Tetap

Bagan Alir sistem akuntansi penghentian pemakaian aset tetap disajikan sebagai berikut :

Bagan 2.1



Bagan 2.1 Sistem Penghentian Pemakaian Aset Tetap

Sumber : Mulyadi (2016)

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Aspek / Nama Peneliti	Roza Febrieli Dawolo (2017) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara	Andrian Budi (2017) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro
Judul	Sistem Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	Sistem Penghapusan Aset Tetap pada Dinas Perikanan Kota Semarang

Institusi yang Diteliti	BPKAD Provinsi Sumatera Utara	Dinas Perikanan Kota Semarang
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa pengertian penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dan dasar hukum penghapusan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah?</li> <li>2. Apakah syarat Barang Milik Daerah yang dapat dihapuskan?</li> <li>3. Bagaimana Mekanisme Penghapusan Aset Pada Badan Pengelolaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa definisi aset tetap / barang milik daerah menurut Dinas Perikanan Kota Semarang?</li> <li>2. Bagaimana penilaian dan penghapusan aset tetap menurut Dinas Perikanan Kota Semarang?</li> <li>3. Siapa saja pihak yang terkait dalam penghapusan aset tetap</li> </ol>



	Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara?	<p>pada Dinas Perikanan Kota Semarang?</p> <p>4. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap dan pencatatan akuntansi menurut Dinas Perikanan Kota Semarang?</p>
Tujuan Penelitian	<p>a. Untuk mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan penghapusan barang milik daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkhusus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam penghapusan barang milik daerah tersebut.</p> <p>c. Untuk mengetahui apakah syarat melakukan penghapusan telah sesuai dengan peraturan tentang</p>	<p>1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan program diploma III Jurusan Akuntansi di Universitas Diponegoro</p> <p>2. Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai materi yang telah dipelajari saat proses perkuliahan.</p> <p>3. Untuk mengetahui aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kota Semarang.</p> <p>4. Untuk mengetahui prosedur penghapusan aset tetap pada Pemerintahan.</p>

	pengelolaan barang milik negara/daerah.	
Metode Penelitian	- Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : wawancara, dokumentasi dan observasi.	- Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: observasi, wawancara. dan studi pustaka - Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir Analisis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini, data-data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis dengan kuantitatif dan kualitatif.
Hasil Penelitian	Dari hasil pengamatan serta pembahasan atas sistem penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1. Sistem penghapusan aset Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan teori	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas sistem penghapusan aset tetap pada Dinas Perikanan Kota Semarang, berikut datanya adalah: 1. Dinas Perikanan dalam prosedurnya menghapuskan aset tetap telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No 71 Tahun

	<p>dan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014, walaupun masih terdapat kekurangan karena pertimbangan atas nilai aset yang akan dihapuskan dengan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut menyebabkan proses penghapusan aset yang dilaksanakan relatif lebih cepat.</p> <p>2. Penyusunan dan sistem evaluasi pembiayaan yang memadai untuk mendukung pemilihan metode yang paling efisien untuk penghapusan.</p>	<p>2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.</p> <p>2. Dinas Perikanan Kota Semarang dalam melakukan penghapusan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.</p> <p>3. Dinas Perikanan Kota Semarang dalam penentuan pengusulan penghapusan aset tetap dengan cara melihat kondisi aset tetap, perbandingan biaya perbaikan dengan perbandingan biaya penghapusan, umur ekonomis yang sudah habis, dan faktor modernisasi.</p> <p>4. Dalam penghapusan aset tetapnya Dinas Perikanan Kota Semarang</p>
--	---	---

	<p>3. Kondisi yang melatarbelakangi penghapusan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebab-sebab lain yang dimana aset telah rusak berat dan sudah tidak dapat digunakan lagi atau dimanfaatkan. Sehingga aset sudah layak untuk dapat dihapuskan dengan menempuh tata cara yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah.</p> <p>4. Aset yang akan dihapuskan akan di hapus dari daftar barang jika sudah dibuat berita acara penghapusan dengan mempertimbangkan nilai sisa umur manfaat aset yang akan dihapus.</p>	<p>melakukannya dengan cara penjualan aset tetap atau lelang.</p> <p>5. Dinas Perikanan Kota Semarang hanya mengusulkan penghapusan aset tetap daerah dan sisanya diserahkan kepada DPPKAD dan Dinas Perikanan tinggal menerima SK Penghapusan Aset Tetap.</p>
--	--	--

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan hasil penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

Persamaan antara penelitian Roza Febrialie Darwono dan Andrian Budi dengan penulis yaitu topik yang diteliti sistem penghapusan aset tetap yang diterapkan pada instansi.

Perbedaan antara penelitian Roza Febrialie Darwono dan Nuri Rahmawati dengan penulis yaitu terdapat pada objek yang diteliti. Pada penelitian Roza Febrialie Darwono meneliti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi sedangkan pada penelitian Andrian Budi meneliti Dinas Perikanan Kota Semarang sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap Badan Keuangan Daerah Kota.

